

Tantangan Radikalisme dan Ekstremisme: Kajian Kritis Terhadap Ekstremisme Perspektif Moderasi Beragama

Ayu Maisari

Institut Agama Islam Negeri Langsa

e-mail: ayumaisari@gmail.com

DOI: 10.22373/tadabbur.v7i2.883

Abstract

The phenomena of radicalism and extremism in the name of religion have become serious challenges to social life, education, and religiosity in Indonesia. Narrow, exclusive, and intolerant religious understandings often develop within both formal and informal educational spaces, and are further exacerbated by the influence of digital media. This study aims to critically examine the meaning, characteristics, and causal factors of radicalism and extremism, while offering religious moderation as an alternative approach to address these challenges. Using a qualitative library research method, the data were analyzed descriptively and critically through relevant academic literature. The findings indicate that radicalism and extremism stem from various factors such as socio-political injustice, religious emotions, cultural clashes, anti-Western sentiments, and weak governmental policies. Religious moderation, which emphasizes *wasatiyyah* (balance), tolerance, and openness, is viewed as a strategic solution for shaping an inclusive and peaceful religious paradigm. Religious education that instills the values of moderation from an early age is crucial to preventing the growth of intolerant ideologies and strengthening the ideological resilience of society in facing the currents of global radicalism.

Keywords: *Radicalism; Extremism; Religious Moderation; Islamic Education*

A. Pendahuluan

Radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama merupakan fenomena yang marak terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional, tetapi juga berdampak terhadap proses pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Secara tidak langsung, pembelajaran pendidikan Islam yang dogmatis mulai jenjang dasar hingga

perguruan tinggi turut membentuk karakter keberagamaan yang cenderung eksklusif.¹ Pemahaman keberagamaan yang sempit ini melahirkan doktrin bahwa hanya agama yang dianutnya yang benar, sedangkan agama lain dipandang sesat, menyimpang, bahkan tidak memiliki hak hidup.

Radikalisasi dan ekstremisme kini menjadi isu global yang serius. Banyak individu dan kelompok terdorong untuk melakukan kekerasan atas nama ideologi atau agama tertentu. Pandangan ekstremis ini tidak hanya merusak harmoni sosial, tetapi juga mengancam integrasi bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian kritis terhadap radikalisme dan ekstremisme, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, dengan menawarkan pendekatan moderasi sebagai solusi alternatif yang lebih humanis dan inklusif.

Fenomena radikalisme juga dapat ditemukan dalam konteks lokal, seperti dalam praktik pendidikan Islam di sekolah maupun dalam lembaga pengajian tradisional di Aceh yang dikenal dengan sebutan *balee*. Dalam proses pembelajaran di *balee*, beberapa kasus menunjukkan bahwa agama bukan diajarkan sebagai nilai spiritual dan moral, melainkan dicampuradukkan dengan budaya lokal dan kepentingan politik. Hal ini berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang menyimpang dari nilai-nilai universal Islam yang damai dan toleran. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan semacam ini akan kesulitan membedakan antara esensi agama dan tafsir-tafsir yang bersifat ideologis dan politis.

Salah satu contoh kasus yang sering disalahpahami adalah makna dari syair lagu *Do Da Idi* yang populer di Aceh. Lagu ini sering ditafsirkan sebagai ajakan bagi anak-anak muda untuk berjihad melawan "kafir". Namun, istilah "kafir" yang dimaksud dalam pemahaman masyarakat awam tidak merujuk pada penjajah atau penindas, melainkan pada pihak-pihak yang berbeda agama, budaya, atau pandangan politik. Akibatnya, muncul sikap intoleran yang menganggap pihak lain sebagai ancaman karena perbedaan yang ada.

Secara teologis, setiap agama memang memiliki kecenderungan untuk mengklaim kebenaran ajarannya.² Akan tetapi, klaim kebenaran tersebut seharusnya bersifat internal dan tidak dijadikan alasan untuk merendahkan atau memusuhi pihak lain.

¹ A Abdurrohman and H Syamsiar, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagamaan Inklusif Untuk Mencegah Radikalisme Beragama Dikalangan Siswa SMA," *Fenomena*, no. Query date: 2025-02-19 16:48:52 (2017), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/789>.

² Wendy Sepmady Hutahaeen, *Teologi Agama-Agama* (Ahlimedia Book, 2021).

Orientasi keberagamaan yang inklusif dan moderat perlu ditanamkan sejak dini untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme dalam diri peserta didik.

Dalam konteks pendidikan, penanaman nilai-nilai keberagamaan yang toleran menjadi sangat penting karena peserta didik berada dalam fase pencarian identitas dan pembentukan cara pandang terhadap dunia. Jika proses pendidikan tidak diarahkan untuk menumbuhkan sikap terbuka dan menghargai perbedaan, maka ruang-ruang belajar justru berpotensi menjadi tempat subur bagi tumbuhnya benih-benih intoleransi.³ Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran strategis untuk membentuk paradigma keberagamaan yang lebih inklusif, dengan memperkuat nilai-nilai moderasi dan kemanusiaan universal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia serta menelaah pendekatan moderasi sebagai strategi alternatif dalam membangun keberagamaan yang damai, toleran, dan inklusif dalam masyarakat multikultural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bertumpu pada analisis konseptual dan kritis terhadap fenomena radikalisme dan ekstremisme dalam konteks keagamaan di Indonesia, serta telaah terhadap konsep moderasi beragama sebagai strategi alternatif dalam menghadapinya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang relevan. Literatur-literatur tersebut digunakan untuk mendeskripsikan, menelaah, dan menganalisis konsep-konsep teoretis mengenai radikalisme, ekstremisme, dan moderasi beragama, serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Indonesia.

Proses analisis dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kritis.⁴ Peneliti mengidentifikasi gagasan-gagasan utama dari berbagai sumber, mengorganisasi data ke dalam kategori tematik (seperti definisi, faktor penyebab, bentuk manifestasi, dan solusi moderasi), lalu menganalisis keterkaitan antar gagasan untuk membangun argumen yang sistematis dan koheren.

³ Nugroho Eko Atmanto and Joko Tri Haryanto, *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama* (DIVA PRESS, 2020).

⁴ Mendra Wijaya et al., *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methods* (PT. Media Penerbit Indonesia, 2025).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Radikalisme: Makna, Ciri, dan Perkembangannya

Secara etimologis, radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti "akar". Dalam bahasa Inggris, istilah *radical* sering diartikan sebagai sesuatu yang ekstrem dan fanatik. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis, bahkan melalui cara-cara kekerasan.⁵

Secara konseptual, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya yang dianggap tidak sesuai dengan idealisme kelompok tertentu. Respons ini dapat muncul dalam bentuk evaluasi kritis, penolakan, hingga perlawanan terhadap lembaga-lembaga sosial dan nilai-nilai yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi yang tidak diinginkan. Dalam konteks keberagamaan, kelompok radikal sering menunjukkan semangat perubahan yang kuat, namun dengan pendekatan yang eksklusif, rigid, dan sering kali mengandung unsur kekerasan.

Menurut Munjid ada beberapa indikator tumbuh-kembangnya radikalisme keagamaan, seperti fanatisme terhadap pendapat sendiri, sikap keras yang tidak proporsional, mewajibkan hal-hal yang tidak diwajibkan oleh ajaran agama, penggunaan cara-cara kasar dalam berdakwah, serta kecenderungan untuk menuduh dan mengkafirkan pihak lain.⁶ Dari gejala tersebut, tampak bahwa radikalisme sering berakar dari pemahaman keagamaan yang sempit dan tertutup, yang kemudian dikembangkan dalam ruang sosial kelompok dengan visi dan misi yang seragam.

Pada awal kemunculannya, paham radikalisme tidak selalu terkait dengan agama tertentu. Namun, pada abad ke-20, radikalisme mulai diidentikkan dengan agama, khususnya Islam. Hal ini dipicu oleh meningkatnya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam, baik di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks Indonesia, isu radikalisme keagamaan menjadi semakin kompleks karena terhubung dengan simbol-simbol dan ajaran agama yang sensitif secara sosial dan politis.

Radikalisme sendiri tidak selalu bersifat negatif. Dalam konteks perubahan sosial, semangat radikal dapat menjadi pendorong transformasi menuju kebaikan, selama

⁵ Abdul Jalil, "Aksi Kekerasan Atas Nama Agama," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 220–34, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>.

⁶ Mohammad Abdul Munjid et al., "Faktor Penyebab Radikalisme Di Indonesia," *Al-Lubab : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam* 8, no. 2 (2022): 235–47, <https://doi.org/10.59689/al-lubab.v8i2.5251>.

dilandasi oleh pemahaman agama yang komprehensif, tidak memaksakan kehendak, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, radikalisme berubah menjadi ancaman ketika diwujudkan dalam bentuk pemaksaan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap kelompok lain.

Fenomena radikalisme yang berkembang di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik utama, antara lain: penolakan terhadap legitimasi negara modern dan aspirasi untuk mendirikan sistem kekhalifahan; penekanan pada perjuangan kekerasan (*jihād*) sebagai strategi utama perubahan politik; serta keterlibatan aktor transnasional yang mendukung agenda kelompok radikal di Indonesia. Aksi-aksi seperti Bom Bali, diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah dan Syiah, hingga pengeboman tempat ibadah, merupakan contoh nyata dari penyalahgunaan agama untuk kepentingan radikal.⁷

Penelitian Thoyyib menyebutkan ada beberapa organisasi yang sering dikaitkan dengan gerakan radikalisme di Indonesia antara lain:⁸

- a. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang mengusung penegakan syariat Islam dan pendirian negara Islam.
- b. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang memperjuangkan sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan alternatif terhadap sistem demokrasi.
- c. Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), yang memaksakan penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan daerah.
- d. Gerakan Wahabi (Salafi), yang menyebarkan ajaran puritan dan membina kader melalui pendidikan ke Timur Tengah.

Radikalisme sering kali dikaitkan dengan terorisme. Kelompok-kelompok radikal menggunakan Islam sebagai legitimasi untuk melancarkan aksi teror. Beberapa aksi teror besar yang terjadi di Indonesia menunjukkan korelasi ini, seperti:

- a. Serangan bom di Mako Brimob (2018) yang menewaskan beberapa anggota kepolisian.
- b. Serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya (13 Mei 2018).
- c. Serangan bom di Gereja Katedral Makassar (28 Maret 2021).

Aksi-aksi teror tersebut menimbulkan ketakutan, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim, serta turut mencoreng citra Islam di mata dunia internasional.

⁷ Mochamad Thoyyib, "Radikalisme Islam Indonesia," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2018): 90–105, <https://doi.org/10.52166/talim.v1i1.636>.

⁸ Thoyyib, "Radikalisme Islam Indonesia."

2. Ekstremisme: Karakteristik dan Bahayanya dalam Keberagamaan

Ekstremisme merujuk pada sikap, pandangan, atau keyakinan yang melampaui batas-batas moderasi dan kewajaran, baik dalam konteks berpikir maupun bertindak. Dalam diskursus keberagamaan, ekstremisme dikenal pula dengan istilah *ghuluw*, yakni sikap berlebih-lebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama hingga keluar dari prinsip keseimbangan yang diajarkan agama itu sendiri. Menurut Jalil ekstremisme merupakan paham atau keyakinan yang diyakini secara absolut, meskipun bertentangan dengan norma sosial, nilai kemanusiaan, dan ajaran agama yang moderat.⁹ Ekstremisme tidak hanya membahayakan individu yang memeluknya, tetapi juga memiliki potensi destruktif terhadap tatanan sosial dan kehidupan berbangsa yang pluralistik.

Secara konseptual, ekstremisme memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, adanya klaim atas kebenaran mutlak (*absolute truth claim*) yang menolak validitas pandangan lain. Sikap ini menjadikan dialog dan perbedaan pandangan sebagai sesuatu yang dicurigai, bahkan dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Kedua, ekstremisme ditandai oleh ketertutupan terhadap kritik dan evaluasi diri. Penganut ekstremisme biasanya menolak refleksi terhadap keyakinan dan tindakannya, serta menganggap kritik sebagai bentuk permusuhan terhadap agama. Ketiga, kecenderungan untuk memaksakan ajaran kepada orang lain, baik secara ideologis maupun dengan kekerasan, menjadi ciri khas dari ekstremisme. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk ujaran kebencian, pengkafiran (*takfir*), atau bahkan penghalalan darah dan harta orang lain yang dianggap berbeda pandangan.

Ekstremisme dalam keberagamaan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia sering kali dipicu oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kekecewaan terhadap kondisi sosial-politik, pemahaman keagamaan yang sempit, pola dakwah yang eksklusif, hingga pengaruh media sosial yang memfasilitasi penyebaran ideologi intoleran. Dalam banyak kasus, ekstremisme juga dibentuk oleh pengalaman traumatis atau ketidakadilan yang kemudian dimaknai secara ideologis. Oleh karena itu, pendekatan terhadap ekstremisme tidak cukup hanya dengan represif, tetapi juga perlu disertai dengan pendekatan edukatif, dialogis, dan kultural.

Walaupun istilah radikalisme dan ekstremisme sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan konseptual. Radikalisme, dalam pengertian

⁹ Jalil, "Aksi Kekerasan Atas Nama Agama."

asalnya, merujuk pada upaya untuk menyentuh akar persoalan dan membawa perubahan secara mendasar. Dalam konteks tertentu, radikalisme tidak selalu bernilai negatif. Namun, ketika radikalisme bertransformasi menjadi ekstremisme, maka ia berubah menjadi paham yang membenarkan penggunaan kekerasan demi memperjuangkan agenda ideologisnya. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara radikalisme yang bersifat kritis dan konstruktif dengan ekstremisme yang destruktif dan anti-dialog.

Bahaya utama ekstremisme terletak pada kemampuannya mengikis nilai-nilai dasar kemanusiaan dan merusak harmoni sosial. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ekstremisme dapat memicu polarisasi, memperlemah kohesi sosial, dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks keberagamaan, ia dapat menimbulkan konflik horizontal antarumat beragama maupun intraumat seagama, serta menjauhkan umat dari substansi ajaran agama itu sendiri yang menjunjung nilai kasih sayang, toleransi, dan keadilan.

3. Faktor Penyebab Radikalisme dan Ekstremisme

Radikalisme dan ekstremisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Menurut Syamsul Bakri Thoyyib, terdapat lima faktor utama yang mendorong lahir dan berkembangnya paham radikal dan ekstrem dalam konteks keberagamaan, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berujung pada tindakan kekerasan, intoleransi, dan bahkan terorisme.¹⁰ Berikut uraian mendalam mengenai kelima faktor tersebut:

Pertama, Faktor sosial-politik. Faktor sosial-politik menjadi salah satu penyebab utama tumbuh suburnya radikalisme dan ekstremisme. Dalam banyak kasus, kekerasan yang dibalut dengan simbol-simbol keagamaan sejatinya lebih mencerminkan ekspresi kekecewaan terhadap ketidakadilan sosial, marginalisasi politik, dan kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan serta perlindungan hak-hak dasar warga negara. Ketika saluran demokratis tersumbat dan ketimpangan sosial semakin meluas, sebagian kelompok masyarakat mencari pelampiasan melalui ideologi keagamaan yang radikal sebagai bentuk protes terhadap sistem. Dalam konteks ini, agama tidak menjadi sumber kekerasan itu sendiri, melainkan dijadikan kendaraan ideologis untuk melawan dominasi politik atau ketidakadilan struktural.

¹⁰ Thoyyib, "Radikalisme Islam Indonesia."

Kedua, Faktor emosi keagamaan. Radikalisme juga dapat dipicu oleh ledakan emosi keagamaan yang tidak dikelola secara baik. Reaksi agresif terhadap pemimpin atau sistem yang dianggap menyimpang dari ajaran agama sering kali dilandasi oleh dorongan emosional, bukan nalar keagamaan yang rasional dan kontekstual. Ketika seseorang merasa bahwa nilai-nilai agamanya sedang dilecehkan, atau komunitasnya mengalami diskriminasi dan penindasan, mereka cenderung bereaksi secara berlebihan. Dalam situasi seperti ini, perasaan marah, kecewa, dan frustrasi dapat dikapitalisasi oleh aktor-aktor ideologis untuk menarik simpati dan mobilisasi massa ke dalam gerakan yang radikal dan eksklusif.

Ketiga, Faktor kultural. Aspek kebudayaan juga berperan dalam menyuburkan paham radikal, terutama ketika terjadi benturan antara budaya lokal dengan pemahaman keagamaan yang rigid dan tekstual. Kelompok radikal biasanya menolak tradisi lokal atau kearifan budaya setempat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mereka yakini. Fenomena ini terjadi akibat kurangnya pemahaman akan keberagaman ekspresi keislaman yang kontekstual dan historis. Pandangan keagamaan yang sempit sering kali mengabaikan kenyataan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi dengan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ketidakmampuan untuk melihat keragaman ini mendorong sikap eksklusif dan permusuhan terhadap budaya lokal yang sebenarnya dapat menjadi sarana dakwah yang efektif.

Keempat, Faktor ideologis anti-Barat (anti-Westernisme). Radikalisme juga berkembang melalui narasi ideologis yang bersifat anti-Barat, yaitu penolakan total terhadap pola pikir, sistem politik, dan gaya hidup Barat. Sikap ini tidak hanya ditujukan pada aspek budaya Barat yang dianggap sekuler dan liberal, tetapi juga terhadap institusi-institusi internasional yang diasosiasikan dengan hegemoni Barat. Dalam pandangan kelompok radikal, Barat sering kali dipersepsikan sebagai musuh Islam yang bertanggung jawab atas penderitaan umat Muslim di berbagai belahan dunia. Ideologi ini kemudian digunakan untuk membangun dikotomi “kami versus mereka”, yang memperkuat semangat perlawanan dan memicu sikap eksklusif serta militansi terhadap segala sesuatu yang diasosiasikan dengan dunia Barat, termasuk dalam hal pendidikan, hukum, dan tata kelola pemerintahan.

Kelima, Faktor kebijakan pemerintah. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah kebijakan pemerintah yang tidak memadai dalam menangani persoalan ideologis,

sosial, dan ekonomi. Lemahnya regulasi dalam menangkal penyebaran ideologi intoleran, minimnya pendidikan yang membekali siswa dengan wawasan kebangsaan dan toleransi, serta ketidakhadiran negara dalam menyelesaikan ketimpangan ekonomi menjadi celah yang dimanfaatkan kelompok radikal untuk menyebarkan pengaruhnya. Ketika negara gagal memberikan alternatif yang kredibel bagi masyarakat—terutama generasi muda—maka ideologi radikal yang menawarkan “kepastian” dan identitas yang kuat akan lebih mudah diterima. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang responsif, adil, dan berpihak pada pemberdayaan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan radikalisme dan ekstremisme secara berkelanjutan.

4. Upaya Pemerintah dalam Menangani Radikalisme dan Ekstremisme

Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme dan ekstremisme, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010. BNPT berperan dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan nasional terkait penanggulangan terorisme, termasuk melalui program kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.¹¹

Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024*. Dalam Perpres ini, ekstremisme didefinisikan sebagai tindakan atau keyakinan yang menggunakan kekerasan ekstrem untuk mendukung atau melaksanakan aksi terorisme.¹²

Kelompok ekstremis umumnya dicirikan oleh cara berpikir yang tertutup, intoleran terhadap perbedaan, anti-demokrasi, dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kelompok ini berbeda dari kelompok radikal dalam pendekatan dan bentuk aksinya, meskipun keduanya sering beririsan dalam praktik di lapangan.

5. Radikalisme dan Ekstremisme dari Perspektif Moderasi

Moderasi beragama merupakan konsep yang menekankan sikap keseimbangan, toleransi, dan keterbukaan dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama.¹³

¹¹ BNPT, “Tugas Pokok dan Fungsi - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” BNPT, accessed June 30, 2025, <https://www.bnpt.go.id/>.

¹² “PERPRES No. 7 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed June 30, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021>.

¹³ Muhammad Fauzinudin Faiz, “Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan Keberagaman,” <https://kemenag.go.id>, 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9>.

Moderasi tidak hanya berarti mengambil posisi di tengah, tetapi juga mencerminkan pendekatan yang adil, inklusif, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan beragama.¹⁴ Tujuan dari moderasi beragama adalah menciptakan harmoni sosial, mencegah sikap ekstrem, serta menghindarkan umat dari fanatisme dan intoleransi yang dapat memicu konflik.¹⁵

Dalam Islam, moderasi dikenal dengan istilah *wasatiyyah*, yaitu jalan tengah yang menyeimbangkan antara aspek spiritual, sosial, dan kultural.¹⁶ Konsep ini tidak hanya berbicara tentang moderasi dalam ibadah, tetapi juga dalam pemikiran, dakwah, dan praktik kehidupan sehari-hari. Moderasi mendorong umat Islam untuk memahami ajaran agama secara komprehensif, baik dari sisi teks maupun konteks, agar tidak terjebak dalam tafsir yang sempit dan rigid.

Secara diskursif, gerakan moderasi diyakini sebagai fondasi utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat multikultural.¹⁷ Klaim eksklusif atas kebenaran agama (*religious absolutism*) sering kali menjadi hambatan dalam membangun relasi antaragama yang sehat. Oleh karena itu, moderasi berupaya mengikis fanatisme keagamaan yang dapat melahirkan sikap saling menyalahkan dan mengkafirkan.

Dalam praktiknya, moderasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga prinsip utama: pertama, Moderasi dalam pemikiran, yakni kemampuan untuk mengintegrasikan teks-teks keagamaan dengan konteks sosial budaya yang dinamis. Pemikiran seperti ini menghasilkan pemahaman yang utuh dan tidak tekstualis semata, sehingga melahirkan sosok muslim yang inklusif dan adaptif.

Kedua, Moderasi dalam gerakan, yaitu pendekatan dakwah yang menekankan pada ajakan kepada kebaikan tanpa paksaan atau kekerasan. Dakwah dilakukan dengan cara yang santun, humanis, dan penuh kasih sayang, sehingga memperkuat semangat perdamaian. Dan ketiga, Moderasi dalam praktik kehidupan, yang mengakomodasi

¹⁴ Jamaluddin Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia," *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1.

¹⁵ Oman Fathurahman, "Kenapa Harus Moderasi Beragama?," <https://kemenag.go.id>, 2020, <https://kemenag.go.id/opini/kenapa-harus-moderasi-beragama-an4gk2>.

¹⁶ Ainun Nafisa et al., "Islam Wasatiyah as a Form of Religious Moderation: Values, Challenges, and Implementation in Indonesia," *Bulletin of Islamic Research* 1, no. 4 (2023): 4, <https://doi.org/10.69526/bir.v1i4.44>.

¹⁷ Suherdiyanto et al., "Moderasi Beragama : Jalan Tengah Menuju Perdamaian Berbasis Nilai-Nilai Universal," *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.31571/gervasi.v9i1.8822>.

Tantangan Radikalisme dan Ekstremisme: Kajian Kritis Terhadap Ekstremisme Perspektif Moderasi Beragama

hubungan antara ajaran agama dan budaya lokal. Seorang muslim moderat mampu berdialog dengan tradisi yang berkembang di masyarakat tanpa kehilangan substansi ajaran Islam, sekaligus tidak menolak nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Moderasi Islam di Indonesia telah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. *Pertama*, umat Islam di Indonesia cenderung toleran dan menjalin relasi yang harmonis dengan kelompok agama lain. *Kedua*, hubungan antara Islam dan negara menunjukkan keterbukaan umat terhadap sistem demokrasi dan ideologi negara. *Ketiga*, umat Islam cukup akomodatif terhadap perkembangan tradisi lokal dan modernitas, sembari tetap mempertahankan orientasi spiritual.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman Islam moderat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman kepada peserta didik.¹⁸ Hal ini menjadi pondasi awal dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dewasa secara emosional dan sosial dalam menyikapi perbedaan.

Namun, tantangan utama dalam era digital adalah penyebaran paham radikal melalui media sosial.¹⁹ Digitalisasi membuka ruang yang luas bagi kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. Dengan bantuan teknologi, konten ekstremis dapat diakses secara cepat, masif, dan lintas wilayah. Tanpa adanya pendekatan moderasi, ruang digital ini dapat menjadi ladang subur bagi tumbuhnya intoleransi dan kekerasan.

Dalam hal ini, moderasi beragama berfungsi sebagai tameng ideologis sekaligus strategi edukatif untuk menangkal penetrasi radikalisme di ruang publik. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong penguatan moderasi beragama sebagai upaya preventif terhadap radikalisme dan ekstremisme. Implementasi kebijakan, penguatan kurikulum pendidikan agama, pelatihan dai dan guru agama, serta pengelolaan konten keagamaan digital menjadi langkah strategis untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

¹⁸ M. Ikhwan et al., "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkuat Moderasi Beragama Di Indonesia," *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 21, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>; Arizul Suwar and Tb Endayani, "The Relevance Of Jalaluddin Rumi's Sufism Education Concept To Character Education In The Digital Era," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.47647/jsh.v4i1.447>.

¹⁹ Maulida Ulfa, "Menjaga Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Menghadapi Teknologi," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 1.

D. Penutup

Radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama merupakan tantangan serius yang mengancam stabilitas sosial, kehidupan berbangsa, dan keberagaman yang inklusif di Indonesia. Akar persoalan keduanya tidak semata-mata bersifat teologis, melainkan kompleks dan multidimensional, mencakup faktor sosial-politik, kultural, emosional, ideologis, hingga lemahnya respons kebijakan negara. Dalam konteks keberagaman, radikalisme dan ekstremisme ditandai oleh klaim kebenaran mutlak, sikap eksklusif, penolakan terhadap perbedaan, serta kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan.

Pendidikan Islam yang semestinya menjadi benteng moral dan spiritual justru berpotensi menjadi lahan subur bagi tumbuhnya pemahaman sempit dan intoleran jika tidak diarahkan pada nilai-nilai keberagaman yang moderat. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi pendekatan strategis yang relevan untuk merespons tantangan ini. Konsep moderasi, yang dalam Islam dikenal dengan *wasatiyyah*, menekankan pada keseimbangan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keragaman dalam berpikir, bertindak, dan berinteraksi sosial.

Upaya deradikalisasi dan pencegahan ekstremisme tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan dan regulasi, tetapi memerlukan penguatan ideologis dan edukatif yang berkelanjutan. Pendidikan moderasi perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui kurikulum formal, pelatihan guru dan dai, maupun melalui kontrol terhadap konten keagamaan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munjid, Mohammad, Baedhowi Baedhowi, and Rusyda Khoirina. "Faktor Penyebab Radikalisme Di Indonesia." *Al-Lubab : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam* 8, no. 2 (2022): 235–47. <https://doi.org/10.59689/al-lubab.v8i2.5251>.
- Abdurrohman, A, and H Syamsiar. "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagaman Inklusif Untuk Mencegah Radikalisme Beragama Dikalangan Siswa SMA." *Fenomena*, no. Query date: 2025-02-19 16:48:52 (2017). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/789>.
- Atmanto, Nugroho Eko, and Joko Tri Haryanto. *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama*. DIVA PRESS, 2020.
- BNPT. "Tugas Pokok dan Fungsi - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme." BNPT. Accessed June 30, 2025. <https://www.bnpt.go.id/>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 7 Tahun 2021." Accessed June 30, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021>.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. "Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan Keberagaman." <https://kemenag.go.id>, 2023. <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9>.
- Fathurahman, Oman. "Kenapa Harus Moderasi Beragama?" <https://kemenag.go.id>, 2020. <https://kemenag.go.id/opini/kenapa-harus-moderasi-beragama-an4gk2>.
- Hutahaean, Wendy Sepmady. *Teologi Agama-Agama*. Ahlimedia Book, 2021.
- Ikhwan, M., Azhar, Dedi Wahyudi, and Afif Alfianto. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkuat Moderasi Beragama Di Indonesia." *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 21, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>.
- Jalil, Abdul. "Aksi Kekerasan Atas Nama Agama." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 220–34. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia." *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1.
- Mendra Wijaya, Bayu Pranomo, Andi Batary Citta, and Sumardi Efendi. *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Nafisa, Ainun, Alpin Iskandar, and Bayu Nugraha. "Islam Wasatiyah as a Form of Religious Moderation: Values, Challenges, and Implementation in Indonesia."

Bulletin of Islamic Research 1, no. 4 (2023): 4.
<https://doi.org/10.69526/bir.v1i4.44>.

Suherdiyanto, Muhammad Lahir, and Maskuri. “Moderasi Beragama : Jalan Tengah Menuju Perdamaian Berbasis Nilai-Nilai Universal.” *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 1 (2025): 1.
<https://doi.org/10.31571/gervasi.v9i1.8822>.

Suwar, Arizul, and Tb Endayani. “The Relevance Of Jalaluddin Rumi’s Sufism Education Concept To Character Education In The Digital Era.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.47647/jsh.v4i1.447>.

Thoyyib, Mochamad. “Radikalisme Islam Indonesia.” *TA’LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2018): 90–105. <https://doi.org/10.52166/talim.v1i1.636>.

Ulfa, Maulida. “Menjaga Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Menghadapi Teknologi.” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 1.